



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jalan Agatish Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 77212
Laman: <https://dkop.bulungan.go.id> Pos-el: dkopbulungan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 100.3.3.5/70/DKOP-BUL

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025-2029
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
BULUNGAN,

Menimbang : a. Berdasarkan hasil evaluasi internal dan penyesuaian dengan rencana strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan tahun 2025-2029 dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2029;

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/ 9/ M.Pan/ 5/ 2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulungan 2025-2045

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun

2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2029 ;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2029;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan untuk menetapkan Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dokumen rencana strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. **KEEMPAT** : Bahwa dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Nomor 800/56/K/DKOP-1/II/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2022 – 2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada,

12 JANUARI 2026

PLT KEPALA DINAS



IR. IWAN SUGIYANTA, ST.M.T
PEMBINA UTAMA MUDA/IV c
NIP. 19690117199703 1005

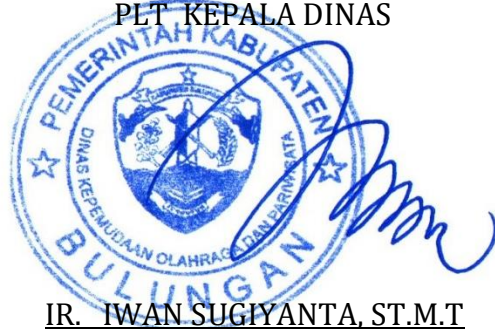
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 100.3.3.5/70/SK/DKOP-BUL TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan pariwisata.
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan pariwisata.
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas.
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis,
 - e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada,
12 JANUARI 2026
PLT KEPALA DINAS



IR. IWAN SUGHYANTA, ST.M.T
PEMBINA UTAMA MUDA/IV c
NIP. 19690117199703 1005

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHARAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN TAHUN
2025-2029

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Alasan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Wirausaha muda	Mengukur tingkat keberhasilan pelatihan kepemudaan dalam menumbuhkan wirausaha muda baru atau meningkatkan peran pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan. Formulasi Penghitungan: Jumlah total pemuda peserta pelatihan/ Jumlah pemuda peserta pelatihan yang menjadi wirausaha muda baru atau aktif dalam kepeloporan/kepemimpinan×100%	untuk mengukur dampak nyata pelatihan kepemudaan, yaitu sejauh mana peserta pelatihan mampu menjadi wirausaha muda baru atau aktif dalam kegiatan kepeloporan dan kepemimpinan serta mendukung tujuan peningkatan kemandirian, kreativitas, dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah (UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan)	Bidang Layanan Kepemudaan
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Mengukur sejauh mana pemuda berperan aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan maupun organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bulungan. Formulasi Penghitungan : Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan/Jumlah Total Pemuda ×100%	untuk mengukur tingkat keterlibatan dan kepedulian pemuda dalam kehidupan sosial dan organisasi ,baik organisasi kepemudaan maupun sosial kemasyarakatan.Semakin tinggi partisipasi pemuda, semakin besar peran mereka dalam pembangunan karakter, kepemimpin dan, dan solidaritas sosial, sesuai dengan tujuanUU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Bidang Layanan Kepemudaan
2.	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah perolehan medali tingkat/ nasional/internasional	Mengukur tingkat prestasi atlet daerah yang mewakili Kabupaten Bulungan dalam berbagai kejuaraan olahraga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.	untuk mengukur keberhasilan pembinaan olahragadiKabupaten Bulungan.Peningkatanperolehanmedali	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga/

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Alasan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
			Formula Penghitungan : Jumlah perolehan seluruh medali dalam 1 (satu) tahun (emas, perak , perunggu)	menunjukkan efektivitas program pembinaan, pelatihan, dan dukungan sarana prasarana olahraga dan mencerminkan kontribusi nyata daerah dalam peningkatan prestasi olahraga nasional dan internasional.	Bidang Pembudayaan Olahraga
3.	Meningkatnyasektor ekonomi bidang pariwisata danbidang ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	mengukur besarnya peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, melalui sumbangan nilai tambah sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Nilai Tambah Sektor Pariwisata (Rp. harga berlaku) / PDRB Kabupaten/Kota (Rp. harga berla ku)}}{100} \times 100\%$	Untuk mengukur dampak ekonomi yang dihasilkan dari sektor baik melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, maupun pertumbuhan usaha di sektor terkait (akomodasi, kuliner, transportasi, dan jasa wisata) dan juga menncerminkan keberhasilan pembangunan dan promosi pariwisata daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan.	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	mengukur peran sektor pariwisata dalam meningkatkan penerimaan daerah secara langsung melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Kontribusi (\%)= PAD dari sektor pariwisata (Rp) / Total PAD daerah (Rp)}}{100} \times 100\%$	Untuk mengukur dampak ekonomi nyata sektor pariwisata terhadap keuangan daerah, dan juga menunjukkan efektivitas kebijakan promosi, pengelolaan objek wisata, dan optimalisasi potensi ekonomi daerah dari sektor pariwisata.	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.	Meningkatnya kunjungan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	mengukur tingkat peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bulungan dari tahun	untuk mengukur keberhasilan promosi dan pengembangan pariwisata daerah.	Bidang Pariwisata dan Ekonomi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Alasan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
	wisatawan		sebelumnya. dengan membandingkan jumlah wisatawan pada tahun berjalan dengan jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya, Formulasi Penghitungan : Jumlah Wisatawan Tahun Lalu- Jumlah Wisatawan Tahun Ini/ Jumlah Wisatawan Tahun Lalu×100%	Peningkatan tingkat kunjungan, menunjukkan efektivitas strategi pengembangan pariwisata, peningkatan fasilitas, dan promosi wisata dan peningkatan kunjungan akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal, lapangan kerja, dan pendapatan sektor pariwisata.	Kreatif

Ditetapkan di Tanjung Selor pada,
12 JANUARI 2026
PLT KEPALA DINAS



IR. IWAN SUGIANTA, ST.M.T
PEMBINA UTAMA MUDA/IV c
NIP. 19690117199703 1005

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 100.3.3.5/70/SK/DKOP-BUL TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III

SEKRETARIS

- Instansi

: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- Tugas

: Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- Fungsi

:

1. Pengkoordinasian kegiatan Dinas;

2. pengkoordinasian penyusunan rencana, prograrm, anggaran Dinas;

3. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;

4. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

6. penataan organisasi dan tata laksana;

7. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;

8. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah; dan

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- | NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL |
|----|--|--|--|
| 1. | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian dinas yang akuntabel, efektif, dan efisien. | <div><div>1. Persentase penatausaha-an keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi opd</div><div>2. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</div><div>3. Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah</div><div>4. Cakupan aktivitas administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan</div></div> | <div><div>1. Tingkat keberhasilan Sekretaris Dinas dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan dan pelaporan kinerja, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas agar tertib, tepat waktu, sesuai standar dan ketentuan</div></div> |

		5. Aktivitas administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan terpenuhinya pelayananan administrasi umum perangkat daerah 6. Dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 7. Aktivitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan 8. Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan 9. Persentase penyediaan pemeliharaan barang milik daerah	peraturan perundang-undangan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan teknis dinas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
--	--	--	---

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU JFT

PERENCANA AHLI MUDA SUB KOORDINASI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, dikoordinasikan, dan difasilitasi oleh sekretariat dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditetapkan/diterima secara resmi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang akuntabel, tertib, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	2. Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd yang disusun dan disampaikan tepat waktu, serta laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd yang difasilitasi oleh sekretariat dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	1. Terlaksananya orang yang menerima gaji dan tunjangan 2. Terlaksananya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas 3. Terlaksananya adminitrasi kepegawaian 4. Terlaksananya paket penyediaan peralatan dan perlengkpkan kantor yang dibayarkan 5. Terlaksananya paket penyediaan bahan logistik kantor 6. Terlaksananya paket barang cetakan dan penggandaan 7. Terlaksananya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 8. Terlaksananya laporan penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. 9. Terlaksananya laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 2. Jumlah adminstrasi pelaksanaan tugas asn yang dibayarkan 3. Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 4. Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan 5. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 6. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan 7. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 8. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 9. Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd 10. Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan 11. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 12. Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan 13. Jumlah paket mebel yang disediakan 14. Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 15. Jumllah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 16. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkepan kantor yang disediakan 17. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1. Jumlah dokumen administrasi umum yang diterima, dicatat, diproses, dan diarsipkan oleh Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian ASN dan non-ASN yang disusun, diperbarui, dan diadministrasikan oleh Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 3. Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian yang disusun dan disampaikan tepat waktu oleh Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dalam 1 (satu) tahun anggaran.

	10. Terlaksananya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 11. Terlaksananya unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 12. Terlaksananya kendaraan dinas perorangan atau dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 13. Terlaksananya aset tidak berwujud yang dipelihara. 14. Terlaksananya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 15. Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 18. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas 19. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	
--	---	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB KOORDINASI BENDAHARA PENGELUARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1. 2.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu Terlaksananya pengelolaan keuangan dan administrasi pengeluaran secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun. 2. Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan yang Disusun 3. Jumlah Laporan pertanggungjawaban Bendahara yang Disusun 4. Jumlah laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang disusun	1. Dokumen perencanaan adalah seluruh dokumen perencanaan tahunan dan penganggaran yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan dan jadwal yang ditetapkan. 2. Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang disusun, dicatat, dan diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 3. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara yang disusun dan disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB KOORDINASI (BENDAHARA PENERIMAAN)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Terlaksananya pengelolaan penerimaan daerah secara tertib, akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Terlaksananya pengelolaan penerimaan daerah secara tertib 2. Terjaminnya ketepatan waktu penyetoran penerimaan daerah 3. Tersedianya laporan penerimaan yang akurat dan tepat waktu	1. Pencatatan penerimaan sesuai ketentuan adalah seluruh transaksi penerimaan daerah yang dicatat dalam Buku Kas Umum dan/atau aplikasi sistem keuangan daerah secara lengkap, benar, dan dapat ditelusuri. 2. Penyetoran tepat waktu adalah penyetoran seluruh penerimaan daerah ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan diterima. 3. Laporan penerimaan adalah laporan realisasi penerimaan yang disusun secara bulanan dan tahunan serta disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Tersedianya laporan administrasi pengeluaran keuangan perangkat daerah	1. Jumlah laporan penatausahaan keuangan yang lengkap dan sah 2. Jumlah laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang disusun 3. Jumlah dokumen pengeluaran yang diarsipkan secara tertib	1. Dokumen pengeluaran dinyatakan lengkap dan sah apabila memenuhi ketentuan administrasi, antara lain SPP, SPM, SP2D, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan. 2. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran disusun secara bulanan dan tahunan sesuai jadwal yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan substantif. 3. Dokumen pengeluaran diarsipkan secara sistematis, aman, mudah ditelusuri, dan tersedia saat dilakukan pemeriksaan atau audit.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN FUNGSIONAL (ARSIPARIS)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Tersedianya pengelolaan arsip perangkat daerah yang tertib, sistematis, aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1. Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola 2. Jumlah Arsip yang Ditata Sesuai Klasifikasi Arsip 3. Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip yang Disusun	1. Jumlah arsip dinamis aktif dan inaktif yang diterima, diklasifikasikan, dicatat, disimpan, dan dipelihara oleh Arsiparis sesuai tata naskah dinas dan klasifikasi arsip dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2. Jumlah arsip yang ditata dan disusun sesuai klasifikasi, indeks, dan sistem penyimpanan arsip berdasarkan ketentuan kearsipan yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran. 3. Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan arsip yang disusun dan disampaikan tepat waktu oleh Arsiparis dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Tersedianya pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang tertib , sistematis aman dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	1. Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola 2. Jumlah surat masuk dan surat keluar yang disusun dengan tertib 3. Jumlah surat masuk dan surat keluar yang rapi.	1. Pengelolaan persuratan adalah proses penerimaan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat sesuai SOP. 2. Pengarsipan dokumen adalah penyimpanan dokumen secara sistematis, aman, dan mudah ditelusuri. 3. Penyajian data tepat waktu adalah penyampaian data dan informasi administrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB KOORDINASI PENGURUS BARANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Terwujudnya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Jumlah barang milik daerah yang ditatausahakan 2. Jumlah dokumen administrasi pengelolaan bmd yang disusun	1. Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dicatat, dikodefikasi, dibukukan, dan diadministrasikan oleh Pengurus Barang sesuai ketentuan pengelolaan BMD dalam 1 (satu) tahun anggaran 2. Jumlah dokumen administrasi pengelolaan BMD yang disusun, diperbarui, dan diarsipkan oleh Pengurus Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran (BAST, KIB, Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berita acara opname, mutasi barang.)

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	1. Terlaksananya pemberian tanda jasa pengabdian 2. Terlaksananya kenaikan pangkat dan jabatan kepada seluruh pegawai 3. Terlaksananya kenaikan gaji berkala 4. Tersedianya data pegawai di lingkungan kerja (KP4) 5. Mengelola absensi kehadiran	1. Jumlah pegawai yang menerima satya lencana 2. Jumlah pegawai yang mnerima kenaikan pangkat 3. Terlaksananya kenaikan gaji berkala pegawai 4. Tersedianya data pegawai 5. Terlaksananya disiplin pegawai	1. Jumlah dokumen laporan yang disusun secara periodik (bulanan dan/atau tahunan) yang memuat data administrasi umum dan kepegawaian, serta disampaikan sesuai ketentuan. 2. Persentase data yang tervalidasi adalah perbandingan jumlah data administrasi umum dan kepegawaian yang telah diverifikasi kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaiannya dengan sumber resmi (sk, simpeg, arsip kepegawaian) terhadap seluruh data yang dikelola dalam satu periode. 3. Perbandingan jumlah data dan dokumen administrasi yang disimpan secara sistematis, aman, mudah ditelusuri, baik dalam bentuk fisik maupun digital, terhadap seluruh data yang dikelola.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD ESELON III
KABID LAYANAN KEPEMUDAAN

- INSTANSI : DINAS KEPEMUDAAN OLAHARAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
- BIDANG : LAYANAN KEPEMUDAAN
- TUGAS : Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan.
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 4. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 7. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan;
 8. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	1. Meningkatnya jumlah pemuda yang terlibat dalam program kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan 2. Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	1. Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan 2. Jumlah pemuda yang mengikuti penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan 3. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1. Mengukur jumlah pemuda yang secara nyata mengikuti dan menyelesaikan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan atau difasilitasi. Mengukur jumlah pemuda yang terlibat dalam program pembinaan kepemudaan, bukan hanya pelatihan, tetapi juga. 3. Mengukur jumlah organisasi kepemudaan (OKP/komunitas pemuda)

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha muda tingkat kabupaten/kota	1. Jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	1. jumlah pemuda usia 16–30 tahun di tingkat kabupaten/kota yang memiliki atau merintis usaha dan mendapatkan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dari pemerintah daerah pada tahun berjalan.
2.	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2. Jumlah dokumen BAST pakaet wirausaha yang diselesaikan	2. jumlah organisasi kepemudaan (okp) tingkat kabupaten/kota yang terdaftar dan aktif, serta mengikuti atau terlibat langsung dalam kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pengembangan organisasi kepemudaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3.	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota	3. Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor dan pelatihan dasar kepemimpinan 4. Jumlah dokumen madya (Muda Berdaya Muda Berkarya) 5. Jumlah pemuda yang mengikuti penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan 6. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	3. jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang ditetapkan sebagai pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dan mendapatkan fasilitasi pengembangan kepeloporan dari pemerintah daerah.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN (BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Tersedianya bahan laporan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha muda tingkat kabupaten/kota	1. Jumlah bahan laporan wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	1. Jumlah pemuda usia 16–30 tahun di tingkat kabupaten/kota yang memiliki atau merintis usaha dan mendapatkan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dari pemerintah daerah pada tahun berjalan.
2.	Tersedianya bahan laporan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2. Jumlah dokumen BAST paket wirausaha yang diselesaikan	2. Jumlah organisasi kepemudaan (okp) tingkat kabupaten/kota yang terdaftar dan aktif, serta mengikuti atau terlibat langsung dalam kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pengembangan organisasi kepemudaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3.	Tersedianya bahan laproan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota	3. Jumlah bahan laproan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan	3. Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang ditetapkan sebagai pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dan mendapatkan fasilitasi pengembangan kepeloporan dari pemerintah daerah.
		4. Jumlah bahan laporan pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ESELON III
KABID PEMBUDAYAAN OLAHRAGA**

INSTANSI : DINAS KEPEMUDAAN OLAHARAGA DAN PARIWISATA

BIDANG : Pembudayaan Olahraga

TUGAS : Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan embinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan embinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
4. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
7. Pelaksanaan administrasi bidang pembudayaan olahraga; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	1. Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga wisata, tantangan dan petualangan. 2. Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat	1. Indikator ini menggambarkan kinerja dalam menyelenggarakan dan mendokumentasikan kegiatan olahraga wisata, olahraga tantangan, dan olahraga petualangan (misalnya arung jeram, trail run, panjat tebing alam, off-road. 2. Indikator ini mengukur upaya pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional melalui penyelenggaraan kegiatan yang terdokumentasi secara resmi. Menunjukkan peran pemerintah daerah dalam: Pelestarian budaya, Pemberdayaan masyarakat, Penguatan identitas lokal

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1. Jumlah dokumen kegiatan pemasaran dan festival olahraga tradisional	1. Jumlah dokumen lembaga yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan olahraga wisata, olahraga tantangan, dan olahraga petualangan dalam satu tahun anggaran.
2.	Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	2. Jumlah Dokumen kegiatan pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	2. Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat dalam satu tahun anggaran.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Terlaksananya pengelolaan kegitan pemasalan dan festival olahraga tradisional	1. Jumlah berkas kegiatan pemasalan dan festival olahraga tradisional yang dihimpun dan dikelola	1. Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat dalam satu tahun anggaran.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Terlaksnanya pemanfaatn olahraga tradisional dalam masyarakat	1. Jumlah bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan lomba olahraga tradisional 2. Jumlah bahan l;aporan hasil pelaksanaan lomba olahraga tradisional	1. Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat dalam satu tahun anggaran.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN (BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Terlaksananya penyiapan bahan administrasi kegiatan pemasaran dan festival olahraga tradisional	1. Jumlah bahan laporan SPJ kegiatan olahraga wisata tantangan dan petualangan 2. Jumlah bahan laporan pelaksanaan kegiatan olahraga wisata tantangan	1. Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan olahraga wisata, olahraga tantangan, dan olahraga petualangan dalam satu tahun anggaran. 2. Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat dalam satu tahun anggaran.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ESELON III
KABID PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**

INSTANSI	: DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
BIDANG	: PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
TUGAS	: Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga; 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPfEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga; 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga; 4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga; 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga; 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga; 7. pelaksanaan administrasi bidang peningkatan prestasi olahraga; dan 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Meningkatnya prestasi olahraga kabupaten Bulungan	1. Jumlah atlet berprestasi	1. Mengukur jumlah atlet daerah yang berhasil meraih prestasi olahraga pada tingkat tertentu dalam periode pelaporan. Indikator ini mencerminkan hasil pembinaan olahraga prestasi.
2.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Bulungan	2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia	2. Mengukur pertambahan atau peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, baik melalui: Pembangunan baru, Rehabilitasi, Pengadaan, Revitalisasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota	1. Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia.	1. Jumlah seluruh sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah daerah dan/atau yang dikelola daerah dalam kondisi layak fungsi pada tahun berjalan.
2	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	2. Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	2. Jumlah dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga serta kompetisi olahraga di satuan pendidikan dasar.
3	Terlaksananya kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	3. Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	3. Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran, baik bersifat multi event maupun single event.
4	Meningkatnya kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait	4. Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang dibina dan diberikan pengembangan	4. Jumlah olahragawan asal kabupaten/kota yang memiliki prestasi resmi dan mendapatkan pembinaan serta pengembangan dari pemerintah daerah pada tahun berjalan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota	1. Jumlah dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana yang diverifikasi	1. Jumlah seluruh sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah daerah dan/atau yang dikelola daerah dalam kondisi layak fungsi pada tahun berjalan.
2	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	2. Jumlah dokumen penyediaan sarana dan prasarana yang diverifikasi	2. Jumlah dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga serta kompetisi olahraga di satuan pendidikan dasar.
3	Terlaksananya kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	3. Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi satuan pendidikan dasara	3. Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran, baik bersifat multi event maupun single event.
4	Meningkatnya kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait	4. Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan dingle event tingkat kabupaten kota	4. Jumlah olahragawan asal kabupaten/kota yang memiliki prestasi resmi dan mendapatkan pembinaan serta pengembangan dari pemerintah daerah pada tahun berjalan.
		5. Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten kota yang dibina dan diberi pengembangan	
		6. Jumlah data atlet berprestasi	
		7. Jumlah cabang olahraga yang memperoleh bantuan hibah	
		8. Jumlah klub yang memperoleh bantuan hibah	
		9. Jumlah hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan.	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN (BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota	1. Jumlah bahan laporan sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia.	1. Jumlah seluruh sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah daerah dan/atau yang dikelola daerah dalam kondisi layak fungsi pada tahun berjalan.
2	Tersedianya bahan laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	2. Jumlah bahan laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	2. Jumlah dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga serta kompetisi olahraga di satuan pendidikan dasar.
3	Tersedianya bahan laporan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	3. Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	3. Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran, baik bersifat multi event maupun single event.
4	Tersedianya bahan laporan meningkatnya kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait	4. Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang dibina dan diberikan pengembangan	4. Jumlah olahragawan asal kabupaten/kota yang memiliki prestasi resmi dan mendapatkan pembinaan serta pengembangan dari pemerintah daerah pada tahun berjalan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Terwujudnya tertib administrasi persuratan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1. Persentase surat masuk dan surat keluar yang dikelola sesuai prosedur 2. Persentase dokumen kegiatan multievent yang disusun dan diarsipkan lengkap 3. Persentase dokumen perencanaan dan pembangunan sarana prasarana olahraga yang didukung administrasi secara lengkap 4. Persentase laporan administrasi kegiatan yang disusun tepat waktu 5. Persentase dokumen dan dokumentasi kegiatan yang diarsipkan secara sistematis	1. Perbandingan jumlah surat masuk dan surat keluar pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang telah dicatat, didisposisikan, ditindaklanjuti, dan diarsipkan sesuai SOP persuratan terhadap seluruh surat yang diterima dan dikeluarkan dalam satu periode. 2. Dokumen administrasi kegiatan multievent olahraga (antara lain surat tugas, undangan, daftar hadir, TOR, laporan kegiatan, dan dokumentasi) yang disusun dan diarsipkan secara lengkap dan tertib terhadap seluruh dokumen kegiatan multievent yang dilaksanakan dalam satu periode. 3. Dokumen administrasi terkait perencanaan dan pembangunan sarana prasarana olahraga (dokumen perencanaan, surat menyurat, notulen rapat, laporan monitoring, dan dokumentasi) yang disiapkan dan dikelola secara lengkap terhadap seluruh dokumen yang diperlukan dalam satu periode 4. Data dan informasi administrasi terkait kegiatan multievent serta perencanaan dan pembangunan sarana prasarana olahraga yang dipenuhi sesuai batas waktu yang ditentukan terhadap seluruh permintaan yang diterima dalam satu periode.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ESELON III
KABID PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

INSTANSI : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
 BIDANG : PAARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 TUGAS : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kepariwisataan, melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi pelaksanaan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, atraksi wisata budaya, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatann dan perlindungan hak kekayaan intelektual serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

FUNGSI :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepariwisataan;Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepariwisataan;
2. Pembinaan, pengembangan pengawasan, pemanfaatan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, atraksi wisata budaya, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatann dan perlindungan hak kekayaan intelektual serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kepariwisataan dan obyek wisata; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	1. Persentase peningkatan kualitas daya tarik wisata	1. Mengukur tingkat peningkatan kualitas daya tarik wisata (DTW) yang dilakukan pemerintah daerah melalui:
2.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	2. Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif.	2. Penataan kawasan, Penyediaan fasilitas pendukung,Kebersihan, keamanan, dan kenyamanan , Aksesibilitas dan amenitas
3.	Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif	3. Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan (dalam/diluar daerah). 4. Jumlah kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf yang dilaksanakan	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ADYATAMA AHLI MUDA (BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	1. Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan destinasi pariwisata milik atau difasilitasi pemerintah daerah yang tersedia dan dalam kondisi layak fungsi/terpelihara pada tahun berjalan.
2.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	2. Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	2. Jumlah laporan resmi hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
3.	Terlaksananya penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	3. Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	3. Jumlah dokumen resmi hasil kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai media, baik di dalam maupun luar negeri, pada tahun berjalan.
4.	Terfasilitasinya proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	4. Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	4. Jumlah laporan resmi hasil kegiatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pelaku ekonomi kreatif dalam proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN (BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Tersedianya bahan laporan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata	1. Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan destinasi pariwisata milik atau difasilitasi pemerintah daerah yang tersedia dan dalam kondisi layak fungsi/terpelihara pada tahun berjalan.
2.	Tersedianya bahan laporan proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	2. Jumlah laporan kunjungan data wisata 3. Jumlah bahan laporan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif 4. Jumlah bahan laporan pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif	2. Jumlah laporan resmi hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. 3. Jumlah dokumen resmi hasil kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai media, baik di dalam maupun luar negeri, pada tahun berjalan. 4. Jumlah laporan resmi hasil kegiatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pelaku ekonomi kreatif dalam proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN (BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Tersedianya bahan laporan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1. Jumlah bahan laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1. Jumlah laporan resmi hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
2.	Tersedianya bahan laporan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	2. Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	2. Jumlah dokumen resmi hasil kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai media, baik di dalam maupun luar negeri, pada tahun berjalan 3. Jumlah laporan resmi hasil kegiatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pelaku ekonomi kreatif dalam proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Terwujudnya tertib administrasi persuratan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Persentase surat masuk dan surat keluar Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikelola sesuai prosedur 2. Persentase dokumen kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarsipkan secara tertib 3. Persentase kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung administrasi secara lengkap 4. Persentase laporan administrasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun tepat waktu	1. Surat masuk dan keluar dicatat, didisposisikan, dan diarsipkan sesuai SOP persuratan. 2. Dokumen berupa laporan kegiatan, kontrak, surat tugas, notulen, dan dokumentasi diarsipkan secara sistematis dan mudah ditelusuri. 3. Kegiatan memperoleh dukungan administrasi berupa surat menyurat, undangan, daftar hadir, dan dokumentasi sesuai kebutuhan. 4. Kegiatan promosi dan event mendapatkan dukungan administrasi seperti surat tugas, perizinan, dan dokumentasi.